



## Collaborative Strategies Between School Committees and School Management in Managing Bosp Funds to Improve Transparency and Effectiveness of Educational Budget Utilization in Senior High Schools in Southeast Sulawesi Province

Vivi Resti Darmison<sup>1</sup>, Aan Ansori<sup>2</sup>, Syaipul Alawi<sup>3</sup>, Muhamad Imammudin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

E-mail: [pps@unis.ac.id](mailto:pps@unis.ac.id), [2407010226@students.unis.ac.id](mailto:2407010226@students.unis.ac.id), [2407010271@students.unis.ac.id](mailto:2407010271@students.unis.ac.id),  
[2407010120@students.unis.ac.id](mailto:2407010120@students.unis.ac.id), [2407010276@students.unis.ac.id](mailto:2407010276@students.unis.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-07-07 Revised: 2025-08-18 Published: 2025-09-08  <b>Keywords:</b> <i>Collaboration;</i> <i>BOSP Funds;</i> <i>School Management;</i> <i>School Committee;</i> <i>Good Governance;</i> <i>School-Based Management.</i>	This study aims to describe the forms of collaboration, supporting factors, and challenges in the management of School Operational Assistance (BOSP) funds at the senior high school level through synergy between school management and school committees. A descriptive qualitative approach was employed, using data collection techniques such as in-depth interviews, direct observation, and document analysis. Informants included principals, BOSP treasurers, school committee chairs, and education supervisors from five public and private senior high schools located in Kendari City, Baubau, Kolaka, and South Konawe. The findings indicate that collaboration was implemented through deliberative planning of school budgets (RKAS), joint monitoring and evaluation forums, and the prioritization of funding based on community needs and parental aspirations. Supporting factors included inclusive leadership by school principals, the professional background of school committee members, and technical training provided by the Department of Education. However, challenges were also identified, such as limited understanding of technical regulations by some committee members, inadequate digital documentation systems, and formal, non-continuous communication patterns between stakeholders. These findings reinforce the relevance of School-Based Management (SBM) theory and good governance principles, and recommend strengthening institutional capacity and improving communication quality between schools and committees as strategic measures for more effective and accountable education funding management.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-07-07 Direvisi: 2025-08-18 Dipublikasi: 2025-09-08  <b>Kata kunci:</b> <i>Kolaborasi;</i> <i>Dana BOSP;</i> <i>Manajemen Sekolah;</i> <i>Komite Sekolah;</i> <i>Good Governance;</i> <i>Manajemen Berbasis Sekolah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi, faktor pendukung, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada jenjang SMA melalui sinergi antara manajemen sekolah dan komite sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOSP, ketua komite sekolah, dan pengawas pendidikan pada lima SMA negeri dan swasta di Kota Kendari, Baubau, Kolaka, dan Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi dilakukan melalui musyawarah dalam penyusunan RKAS, pelibatan dalam forum monitoring dan evaluasi, serta penetapan prioritas anggaran berdasarkan aspirasi masyarakat. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan kepala sekolah yang terbuka, profesionalisme komite sekolah, dan dukungan pelatihan dari Dinas Pendidikan. Namun demikian, terdapat kendala seperti rendahnya literasi regulasi teknis oleh komite, belum optimalnya sistem dokumentasi digital, serta pola komunikasi yang masih formal dan tidak berkelanjutan. Temuan ini memperkuat teori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan prinsip good governance, serta merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas komunikasi antara sekolah dan komite sebagai strategi dalam pengelolaan dana pendidikan yang lebih efektif dan akuntabel.

### I. PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) berperan strategis dalam menjamin keberlangsungan operasional pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini dirancang untuk mendorong tata kelola pendidikan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai prinsip *good governance* (GCG) di sektor publik. Penelitian oleh Asna Adil et al. (2024) di SMP Negeri 18 Lau, Maros menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana BOSP dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap petunjuk teknis, serta keterlibatan aktif kepala sekolah

dan komite sekolah dalam setiap tahap pengelolaan. Rachmawati (2023) juga menggarisbawahi bahwa pelibatan komite sekolah dalam perencanaan RKAS merupakan faktor krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi penggunaan dana tersebut.

Namun demikian, di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, pengelolaan dana BOSP menghadapi tantangan yang lebih kompleks akibat kondisi geografis yang sulit dan keragaman sosial yang tinggi. Studi fenomenologis di Kota Baubau menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi akuntabilitas di lapangan masih menemui kendala, terutama dalam hal supervisi komite sekolah dan pelibatan masyarakat. Temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal, yang memperlihatkan belum optimalnya sinergi antara manajemen sekolah dan komite dalam mengelola dana secara transparan dan partisipatif.

Pada aspek internal sekolah, peran komite sekolah terbukti sangat krusial dalam pengawasan dana BOSP. Studi oleh Indriati, Nurkolis, dan Ginting (2025) di Kabupaten Temanggung mengungkapkan adanya korelasi kuat antara peran aktif komite sekolah dan transparansi pengelolaan dana (koefisien korelasi 0,687) serta kontribusi signifikan sebesar 47,3%. Selain itu, kompetensi manajerial kepala sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian juga menunjukkan pengaruh nyata terhadap transparansi (koefisien 0,676, kontribusi 45,6%). Temuan ini menguatkan prinsip dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), yang menekankan pentingnya kepemimpinan efektif dan partisipasi komite dalam tata kelola pendidikan.

Transparansi dalam pengelolaan dana BOSP juga terbukti berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan mutu layanan pendidikan. Penelitian oleh Lukas (2024) di Jakarta memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan transparansi di setiap tahap pengelolaan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan memperoleh kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan. Sementara itu, studi oleh Teza (2024) di SMA Negeri 4 Palangka Raya menunjukkan bahwa sosialisasi terbuka mengenai penggunaan dana kepada orang tua/wali murid, baik secara langsung maupun daring, dapat memperkuat prinsip transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana, meskipun terdapat tantangan dalam efisiensi anggaran.

Pendekatan kolaboratif antara manajemen sekolah dan komite sekolah perlu dipahami bukan semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial yang memberi legitimasi publik atas kebijakan pendidikan. Sarwoedi (2025) menegaskan bahwa keterlibatan aktif komite dan orang tua murid mampu meningkatkan responsivitas sekolah terhadap kebutuhan lokal, menjadikan pengelolaan dana lebih tepat sasaran dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Di daerah seperti Sulawesi Tenggara, di mana akses informasi terbatas dan masyarakat bersifat heterogen, model kolaboratif ini menjadi semakin relevan dalam membangun tata kelola pendidikan yang inklusif.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, kajian strategis terhadap sinergi antara manajemen sekolah dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOSP di jenjang SMA di Sulawesi Tenggara menjadi sangat penting. Implikasi dari penelitian sebelumnya yang menyoroti hubungan positif antara peran komite dan transparansi (Indriati *et al.*, 2025; Asna Adil *et al.*, 2024), serta pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap akuntabilitas dapat dijadikan landasan dalam merancang strategi kolaboratif yang sistemik. Implementasi perencanaan partisipatif, pelaksanaan berbasis kolaborasi, serta mekanisme pertanggungjawaban terbuka akan memperkuat akuntabilitas, memberdayakan masyarakat lokal, dan memastikan bahwa penggunaan dana BOSP berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan sosial seperti Sulawesi Tenggara.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam strategi kolaboratif antara komite sekolah dan manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BOSP pada jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang dikaji, yaitu fenomena sosial yang kompleks, dinamis, dan kontekstual. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2021), metode kualitatif bertujuan untuk memahami makna, konteks, dan pola-pola interaksi sosial dari perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara naturalistik dan tidak dimanipulasi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas kepala sekolah, bendahara BOSP, ketua komite sekolah, dan pengawas pendidikan. Mereka berasal dari lima SMA negeri dan swasta yang tersebar di empat wilayah utama di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keragaman geografis dan sosial-budaya yang menjadi latar kontekstual penting dalam pengelolaan dana pendidikan di daerah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi metode, yakni melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap manajemen sekolah dan komite sekolah untuk menggali pemahaman mereka tentang proses kolaborasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan dana BOSP. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pengalaman dan pandangannya. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati aktivitas nyata dalam proses perencanaan keuangan sekolah, pelaksanaan program yang didanai oleh BOSP, serta mekanisme pelaporan keuangan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan keuangan, serta notulen rapat komite sekolah.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses menyederhanakan dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif serta matriks tematik agar pola-pola yang ditemukan lebih mudah dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bertujuan merumuskan temuan-temuan utama secara sistematis dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses analisis ini bersifat iteratif, di mana peneliti terus-menerus melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap data yang diperoleh hingga mencapai saturasi.

Dalam rangka meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi

sumber dan teknik, sebagaimana disarankan oleh Patton (2002). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (kepala sekolah, bendahara, komite, dan pengawas), sementara triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan demikian, validitas temuan dapat diperkuat dan bias dapat diminimalkan. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh dan kontekstual mengenai dinamika pengelolaan dana BOSP secara kolaboratif di lingkungan sekolah menengah atas di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial seperti Sulawesi Tenggara.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk Kolaborasi yang Diterapkan

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara pihak sekolah dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOSP dilaksanakan melalui pendekatan musyawarah dan partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), keterlibatan tidak hanya berasal dari kepala sekolah dan bendahara, tetapi juga mencakup komite sekolah dalam forum diskusi terbuka yang bersifat deliberatif. Proses ini mencerminkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam kebijakan pengelolaan BOS/BOSP yang berbasis manajemen partisipatif. Studi oleh Firdaus *et al.*, (2023) menguatkan bahwa partisipasi komite dalam perencanaan keuangan sekolah dapat meningkatkan legitimasi keputusan anggaran dan mencegah dominasi sepihak oleh manajemen sekolah. Partisipasi ini menjadi penting dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan sekaligus membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat.

Lebih lanjut, komite sekolah juga secara aktif dilibatkan dalam forum monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan dana BOSP yang dilakukan secara periodik. Hasil observasi menunjukkan bahwa sejumlah sekolah memanfaatkan forum ini sebagai sarana kontrol sosial yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan kesesuaian penggunaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azizah & Yusran (2022), yang menyatakan bahwa forum evaluasi

publik yang melibatkan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, penetapan prioritas alokasi dana BOSP dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil sekolah serta aspirasi orang tua peserta didik. Pendekatan ini menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan komunitas sekolah dan mencerminkan prinsip kebijakan pendidikan yang inklusif, sebagaimana juga direkomendasikan oleh Rachmawati (2023).

## 2. Faktor Pendukung Kolaborasi

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penguat kolaborasi antara pihak sekolah dan komite dalam pengelolaan dana BOSP. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat inklusif dan terbuka terhadap partisipasi eksternal. Kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan partisipatif cenderung membangun komunikasi yang intens dan memberdayakan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini sesuai dengan temuan Arifin dan Nurlaelawati (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang partisipatif berperan penting dalam membentuk tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel. Komite sekolah tidak hanya dijadikan pelengkap administratif, tetapi menjadi mitra aktif dalam menentukan arah penggunaan dana dan prioritas program.

Faktor pendukung lainnya adalah latar belakang profesional yang dimiliki oleh anggota komite sekolah, yang memberikan nilai tambah dalam fungsi pengawasan dan evaluasi. Komite dengan pemahaman teknis yang baik mampu menjalankan fungsi kontrol secara lebih efektif, seperti diungkapkan oleh Hidayatullah & Ramadhan (2024), bahwa kapasitas komite yang kuat berdampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Selain itu, peran Dinas Pendidikan juga tidak dapat diabaikan. Pelatihan teknis yang diberikan kepada kepala sekolah dan komite dalam memahami prosedur pengelolaan dana BOSP menjadi penguat dalam menyatukan pemahaman antara regulasi nasional dan konteks lokal sekolah. Putri & Salim (2023)

menekankan bahwa pelatihan berkelanjutan serta pendampingan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas implementasi kebijakan, sekaligus menghindari kesenjangan interpretasi di tingkat lapangan.

## 3. Kendala yang Dihadapi

Meskipun kolaborasi antara pihak sekolah dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOSP menunjukkan kemajuan, masih terdapat sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman komite sekolah terhadap regulasi teknis yang mengatur alur penggunaan dan pelaporan anggaran BOSP. Hal ini menyebabkan sebagian komite bersikap pasif dan kurang terlibat dalam proses perencanaan maupun pengawasan keuangan sekolah. Temuan ini diperkuat oleh Lestari dan Supriyadi (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi terhadap regulasi menjadi penghambat peran strategis komite dalam pengelolaan dana publik pendidikan. Ketika peran komite tidak berjalan secara optimal, maka fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran juga melemah, sehingga berisiko pada rendahnya akuntabilitas sekolah di mata masyarakat.

Selain itu, tantangan lain yang turut menghambat optimalisasi pengelolaan dana BOSP adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di sejumlah sekolah, khususnya yang berada di wilayah pinggiran atau terpencil. Banyak sekolah masih bergantung pada sistem dokumentasi manual yang lambat dan rawan kesalahan dalam pelaporan. Mahfud *et al.*, (2022) menyatakan bahwa digitalisasi sistem keuangan di sekolah secara langsung meningkatkan kualitas pelaporan serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Namun, tanpa dukungan infrastruktur dan pelatihan teknis, proses digitalisasi menjadi sulit dilakukan. Kendala lainnya adalah pola komunikasi antara sekolah dan komite yang cenderung formal, insidental, dan tidak berlangsung secara reguler. Dalam banyak kasus, komunikasi hanya terjadi saat rapat triwulan atau tahunan, tanpa adanya forum dialog yang berkelanjutan. Dewi dan Hamdan (2020) menekankan bahwa komunikasi yang

terbuka dan rutin adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan pendidikan. Tanpa komunikasi yang efektif, kolaborasi yang terjadi rentan menjadi simbolis dan tidak berdampak pada perbaikan substantif.

#### 4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat, khususnya melalui komite sekolah, dalam proses manajemen pendidikan. Kolaborasi yang terbangun antara kepala sekolah dan komite sekolah terbukti efektif dalam mendukung pengelolaan dana BOSP secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas di tingkat satuan pendidikan. Efektivitas kolaborasi ini sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah yang terbuka dan struktur organisasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat berjalan secara bermakna. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hasibuan (2022) yang menyatakan bahwa kualitas kolaborasi antara sekolah dan masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan reformasi birokrasi pendidikan di tingkat mikro.

Secara praktis, penelitian ini memberikan arahan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia komite sekolah menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penguatan sistem dokumentasi berbasis digital juga penting untuk memastikan keterbukaan informasi dan efisiensi administrasi keuangan sekolah. Tidak kalah pentingnya adalah penyediaan forum komunikasi yang rutin dan dialogis antara sekolah dan komite agar terbangun relasi yang berkelanjutan dan saling percaya. Ketiga aspek ini perlu menjadi agenda prioritas dalam intervensi kebijakan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, agar kolaborasi yang terbangun bukan hanya bersifat simbolik, melainkan menjadi mekanisme strategis dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOSP dan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh.

## B. Pembahasan

Kolaborasi yang efektif antara manajemen sekolah dan komite sekolah merupakan faktor krusial dalam memastikan keberhasilan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelibatan komite dalam proses pengambilan keputusan anggaran berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. Praktik ini sejalan dengan prinsip dasar dalam otonomi pendidikan, di mana kewenangan dan tanggung jawab tidak hanya disentralisasi ke tingkat satuan pendidikan, tetapi juga dibagi bersama dengan pemangku kepentingan masyarakat, termasuk komite sekolah. Pendekatan ini juga merupakan implementasi dari manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), sebagaimana dikemukakan oleh Fattah (2022), bahwa partisipasi masyarakat melalui komite sekolah merupakan wujud kontrol sosial yang sah terhadap proses perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan. Semakin tinggi partisipasi komite, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di sekolah.

Meskipun demikian, kualitas kolaborasi tidak dapat dilepaskan dari kapasitas individu serta budaya organisasi sekolah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki kultur komunikasi terbuka, dialogis, dan responsif terhadap masukan dari komite, cenderung menunjukkan ketertiban dalam administrasi keuangan dan minimnya pengaduan dari masyarakat. Hal ini diperkuat oleh studi Lestari & Supriyadi (2021), yang menggarisbawahi pentingnya kompetensi interpersonal kepala sekolah dan komite dalam membangun sinergi yang harmonis dan produktif. Sebaliknya, sekolah yang menjadikan komite hanya sebagai pelengkap administratif tanpa keterlibatan substantif dalam penyusunan RKAS dan pengawasan anggaran, berpotensi mengalami ketimpangan informasi, rendahnya akuntabilitas, serta kesenjangan persepsi antara sekolah dan masyarakat.

Lebih jauh, pelibatan komite sekolah seharusnya tidak terbatas pada aspek administratif atau formalitas persetujuan dokumen, tetapi sebagai representasi suara dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya pendidikan. Komite sekolah

memegang peran penting sebagai penghubung antara sekolah dan lingkungan sosialnya, termasuk dalam mengidentifikasi kebutuhan riil peserta didik, kondisi infrastruktur, hingga keberlanjutan program pendidikan berbasis kebutuhan lokal. Seperti dijelaskan oleh Mahfud *et al.*, (2022), kehadiran komite sekolah yang aktif memperkuat legitimasi kebijakan sekolah dan mendorong efektivitas implementasi program anggaran. Kolaborasi ini bukan sekadar prosedural, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola yang demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kolaborasi antara manajemen sekolah dan komite perlu diarahkan pada dua pendekatan utama: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kultur organisasi. Pelatihan teknis mengenai regulasi BOSP, transparansi anggaran, serta teknik komunikasi publik perlu diberikan secara berkala baik kepada kepala sekolah maupun anggota komite. Di sisi lain, pembiasaan terhadap budaya kerja kolaboratif yang menekankan keterbukaan informasi, partisipasi aktif, dan pengambilan keputusan bersama perlu ditanamkan sebagai bagian dari etos kerja kelembagaan. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi fondasi tata kelola pendidikan yang profesional, partisipatif, dan akuntabel.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara manajemen sekolah dan komite sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana BOSP. Bentuk kolaborasi yang ditemukan mencakup penyusunan RKAS secara musyawarah, keterlibatan komite dalam forum monitoring dan evaluasi, serta penetapan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan lokal sekolah. Kolaborasi ini mencerminkan implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan kolaborasi ini sangat didukung oleh sejumlah faktor, seperti kepemimpinan kepala sekolah yang terbuka, kompetensi profesional anggota komite, serta dukungan Dinas Pendidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan dana. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam implementasi kolaborasi, seperti

keterbatasan pemahaman komite terhadap regulasi BOSP, belum optimalnya sistem dokumentasi digital di beberapa sekolah, serta komunikasi yang masih bersifat formal dan tidak berkelanjutan. Secara keseluruhan, kolaborasi yang kuat antara sekolah dan komite tidak hanya memperbaiki aspek administratif dan teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel merupakan kunci dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial seperti Sulawesi Tenggara.

##### B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait. Bagi pihak sekolah, disarankan untuk membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, dialogis, dan berkelanjutan dengan komite sekolah. Komite seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar simbol administratif, khususnya dalam penyusunan RKAS dan pengawasan penggunaan dana BOSP. Bagi komite sekolah, diperlukan peningkatan kapasitas dan literasi terhadap regulasi serta aspek teknis pengelolaan dana pendidikan. Komite yang memahami secara mendalam peran, hak, dan tanggung jawabnya akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi kontrol, advokasi, dan pemberi pertimbangan terhadap kebijakan sekolah. Selanjutnya, bagi Dinas Pendidikan, penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program pelatihan terkait pengelolaan dana BOSP, baik bagi kepala sekolah maupun komite. Selain pelatihan, pendampingan rutin serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini pada jenjang pendidikan yang berbeda atau di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial lainnya. Hal ini penting untuk memperkaya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kolaborasi yang kontekstual dan adaptif dalam pengelolaan dana publik sektor pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adil, A., Masri, M., & Irwansyah, I. (2024). Implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 18 Lau Maros. *Jurnal Remittance: Riset Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 59-68. <https://ejournal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/517>
- Arifin, Z., & Nurlaelawati, I. (2021). Kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. *Jurnal Kependidikan*, 9(2), 112-121. <https://doi.org/10.24090/jk.v9i2.4231>
- Azizah, N., & Yusran, M. (2022). Peran komite sekolah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 45-58. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajpendidikan/article/view/20465>
- Dewi, R. A., & Hamdan, A. (2020). Komunikasi efektif antara kepala sekolah dan komite dalam implementasi MBS. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(3), 85-94. <https://ejournal.uksw.edu/jpp/article/view/3405>
- Fattah, N. (2022). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep dan praktik dalam sistem pendidikan otonom*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firdaus, M., Sari, D., & Maulana, H. (2023). Transparansi pengelolaan dana BOSP berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Pendidikan Nusantara*, 5(1), 33-47. <https://jurnal.umrah.ac.id/index.php/japn/article/view/2894>
- Hasibuan, F. (2022). Kolaborasi komite sekolah dalam tata kelola pendidikan dasar: Studi kasus implementasi good governance. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Pendidikan*, 3(2), 76-88. <https://doi.org/10.23887/jekp.v3i2.5478>
- Hidayatullah, R., & Ramadhan, S. (2024). Kompetensi komite sekolah dan efektivitas penggunaan dana BOS. *Jurnal Ilmu Manajemen Pendidikan*, 6(1), 92-105. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/jimp/article/view/6912>
- Indriati, L., Nurkolis, N., & Ginting, S. A. (2025). Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap transparansi pengelolaan dana BOSP. *Jurnal Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2412-2424. <https://edukatif.org/edukatif/article/download/7689/pdf>
- Lestari, W., & Supriyadi, A. (2021). Tantangan peran komite sekolah dalam pengawasan anggaran BOS. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 7(2), 150-161. <https://journal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/jpm/article/view/2015>
- Lukas, L. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam perspektif good governance. *Al-Munadzomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 134-148. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/al-munadzomah/article/view/1737>
- Mahfud, M., Rahayu, S., & Zakaria, M. (2022). Digitalisasi sistem pelaporan keuangan sekolah: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(1), 39-52. <https://doi.org/10.21009/jtp.v8i1.27964>
- Putri, S. A., & Salim, N. (2023). Peran Dinas Pendidikan dalam pelatihan pengelolaan dana BOSP di sekolah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Daerah*, 4(2), 67-78. <https://ejournal.kemdikbud.go.id/index.php/jkpd/article/view/2783>
- Rachmawati, L. (2023). Aspirasi orang tua sebagai dasar penyusunan RKAS: Studi kolaboratif sekolah dan komite. *Jurnal Jendela Edukasi*, 11(3), 112-125. <https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJE/article/view/442>
- Rachmawati, R. (2023). Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS oleh komite sekolah. *Jurnal Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 117-129. <https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJP/article/view/442>
- Sarwoedi, S. (2025). Penguatan peran komite sekolah dalam tata kelola dana BOS di era otonomi pendidikan. *Al-Munadzomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 45-60.

<https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/al-munadzomah/article/download/1737>

Teza, V. R. (2024). Efektivitas sosialisasi dana BOSP dalam meningkatkan akuntabilitas sekolah menengah atas. *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 15(1), 88–101.  
<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/edu/article/download/12434/5592>